

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB DPRD KABUPATEN NGADA TERHADAP PENGANTAR NOTA KEUANGAN ATAS RANCANGAN**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2025**

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Assalamualaikum Warahmatulah wabarakatuh

Om Swastiastu

Salve

Namo Budaya

Salam Kebajikan

Salam Sehat

**Yang Terhormat :**

* Bapak Bupati Ngada
* Bapak Wakil Bupati Ngada
* Bapak Pimpinan DPRD Ngada
* Bapak-Bpak Anggota DPRD Ngada
* Bapak Sekda Ngada
* Para Staf Ahli Bupati Ngada
* Para Asisten
* Bapak/Ibu Pimpinan OPD Kabupaten Ngada
* Rekan- rekan Pers
* Singkatnya Hadirin serta Undangan yang kami hormati

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Ngada terhadap Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025, Fraksi PKB mengajak, marilah kita luangkan waktu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Sang Penyelenggara Kehidupan yang tak henti-hentinya mencurahkan berkat, rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga kita boleh bertemu kembali di tempat terhormat ini untuk mengawali masa sidang ini dalam keadaan sehat walfiat.

Fraksi juga menyampiakan ucapan terima kasih kepada kita semua, baik kepada Pemerintah maupun Kepada Forum Dewan yang terhormat ini, yang masih meluangkan kesempatan untuk menyatu dalam Rapat Paripurna ini, guna membahas Anggaran Perubahan demi suksesnya Pembangunan daerah kita tercinta ini, sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Panca Cita), serta program Asta Cita ( Program Kerja Presiden dan wakil Presiden) dan Dasa Cita ( Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur).

Fraksi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PKB untuk menyampaikan Pemandangan umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025.

**Forum Rapat Paripurna serta Hadirin yang Kami Hormati,**

Perubahan anggaran di dalam APBD bertujuan untuk menyesuaikan anggaran keuangan daerah (pendapatan dan belanja) sesuai dengan kondisi dan situasi pembangunan daerah. Perkembangan situasi dan kondisi inilah yang akan mempengaruhi besaran anggaran suatu daerah.

Perubahan APBD juga menggambarkan kebutuhan fiscal daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan yang tidak terikat pelayanan dasar maupun urusan pilihan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan regulasi sebagai landasan hukumnya.

Perubahan APBD dilakukan melalui mekanisme resmi, dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBD oleh Kepala Daerah dan pembahasannya besama DPRD. Perubahan APBD bukan tindakan adminsistrasi biasa. Perubahan APBD merupakan bentuk tanggapan aktif Pemerintah Daerah terhadap kondisi factual, seperti kurangnya pendapatan, atau efisiensi belanja, penyesuaian terhadap pendapatan ril, perubahan prioritas belanja, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional.

Sehubungan dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025, Fraksi PKB menyampaikan beberapa pokok pikiran.

1. **Pendapatan Daerah**
2. Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. **Rp. 913.132.854.716,73** (*Sembilan ratus tiga belas miliar seratus tiga puluh dua juta delapan rat us lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah tujuh puluh tiga sen*) turun secara signifikan sebesar Rp.56.065.952.131,17,- dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada APBD Murni sebesar Rp. **969.198.806.847,90,-** Pendapatan Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. sebesar **Rp. 71.503.104.943,90** (*Tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga juta seratus empat ribu sembilan ratus* *empat puluh tiga ribu sembilan puluh sen*) bertambah sebesar **Rp.6.919.655.301,00,-** dibandingkan dengantarget pada APBD Murni sebesar **Rp. 64.583.449.642,90,-** (2) Pendapatan Transfer sebesar Rp. sebesar **Rp. 833.607.352.721,00,-** (*Delapan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*). Turun sebesar Rp. 63.390.616.545 dibandingkan dengan target penerimaan pada APBD Murni sebesar Rp. 96.997.969.266,00.,- (3) **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** sebesar **Rp.8.022.397.051,83,-** (*delapan miliar dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen*), , naik sebesar Rp. 405.009.112,83
3. Terkait dengan Pendapatan Daerah, Fraksi menilai bahwa hingga saat ini ketergantungan fiscal Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Kebijakan Pemerintah Pusat yang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres No.1 Tahun 2 025 berdampak pada berubahnya kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Fraksi meminta Pemerintah untuk: (1) mencari cara dan solusi melalui berpikir cerdas, bekerja keras, inovasi-kreasi dalam aksi untuk menggali, menemukan sumber baru serta mengelola berbagai sumber Pendapatan Daerah guna meningkatkan PAD Kabupaten Ngada.
4. Pentingnya upaya peningkatan kapasistas SDM Pengelola anggaran. ASN yang berada pada posisi perencanaan dan keuangan harus memiliki kompetensi dalam analisis fiscal, perencanaan yang tepat, manajemen perubahan, serta mampu merespons krisis.
5. Fraksi juga mengharapakan kiranya dalam melakukan penganggaran Pendapatan Daerah pada Anggaran Perubahan, perlu mempertimbangkan Rasionalisasi target Pendapatan, sehingga pada akhirnya Target Pendapatan bisa mendekati target yang ditetapkan bersama Pemerintah dan Lembaga DPRD.
6. **Belanja Daerah**
7. Anggaran Belanja Daerah pada Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar sebesar Rp. **Rp. 989.936.952.207,19** (*sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar Sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah sembilan belas sen*) naik sebesar Rp.1.192.826.080,29 dibandingkan dengan proyeksi belanja pada APBD Murni sebesar 988.744.126.126,90. Anggaran Belanja Daerah terdiri dari: (1). **Belanja Operasi** direncanakan sebesar **Rp. 688.811.054.248,19**,- (*enam ratus delapan puluh delapan puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah Sembilan belas sen*) naik sebesar Rp. 9.413.387.982,29 dibandingkan dengan proyeksi belanja pada APBD Murni sebesar Rp. 79.397.666.265,90. (2) **Belanja Modal** direncanakan sebesar **Rp. 90.1 97.690.279,00**,- (*sembilan puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) berkurang sebesar (Rp.12.508.561.902) dibandingkan dengan APBD Murni sebesar Rp. 102.706.252.181,00,- (3). **Belanja Tidak Terduga** direncanakan sebesar **Rp. 5,800,000,000.-** (*lima miliar delapan ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp.1.300.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni sebesar Rp.4.500.000.000,00. (4). **Belanja Transfer,** direncanakan sebesar **Rp. 205.128.207.680,00,-** (*dua ratus lima miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) naik sebesar p.2.988.000.000 dibandingkan pada APBD Murni sebesar Rp. 202.140.207.680,00,
8. Berkaiatan dengan Belanja Daerah Pemerintah perlu menghidari salah satu resiko paling nyata yaitu munculnya **defisit yang tidak terkendali**, yang disebabkan penyesuaian pendapatan dan belanja yang tidak seimbanga. Ketika pendapatan diprediksi menurun dan pemerintah tetap mempertahankan belanja dalam jumlah besara, maka akan mjncul gap angaran yang membebani pembiayaan,.
9. Fraksi meminta Pemerintah untuk menjalankan semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan urgensi dalam mengatasi berbagai persoalan di tengah masyarakat agar pada saatnya dapat semuanya terealisasi.
10. Mengingat penyediaan dana belanja masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang terbatas jumlahnya dalam upaya menopang kebutuhan belanja publik, maka Pemerintah harus menjalankan Belanja Daerah secara cermat, cepat dan tepat sasar sesuai tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

***Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat***

Sebelum mengakhiri Pemandangan Umum ini, Fraksi PKB memberikan beberapa catatan Kritis kepada pemerintah berkaitan dengan Perubahan Anggaaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

1. Fraksi meminta Pemerintah untuk melakukan Evaluasi Pasca Perubahan. Setiap kali Perubahan APBD dilakukan, pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan dampaknya, baik dari sisi kinerja program maupun akuntabilitas keuangan. Hasil evaluasi ini menjadi masukan penting bagi tahun anggaran berikutnya.
2. Pemerintah harus menjamin bahwa dokumen perubahan APBD dapat diakses oleh public secara terbuka, temasuk melalui laman resmi pemerintah daerah. Keterbukaan ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga memberikan ruang bagi public untuk mengontrol secara langsung belanja pemerintah daerah. Mengingat, dalam era digital, public tidak hanya menilai hasil akhir pembangunan, tatapi juga menngikuti proses perencanaan dan penganggaran secara real time.
3. Fraksi minta penjelasan pemerintah terhadap target perolehan pendapatan asli daerah riil yang dapat tercapai sampai akhir tahun anggaran 2025, mohon disertai rincian perkiraan serta rancangan untuk dapat meningkatakan PAD yang cukup signifikan
4. Dalam konteks membangun Desa Fraksi meminta pemerintah untuk melakukan modernisasi pola pembangunan bidang pertanian. Modernisasi pertanian bertujuan untuk mengadopsi teknologi, praktik pertanian yang lebih canggih, dan penyediaan infrastruktur seperti pembangunan jalan tani yang dapt memperlancar kegiatan pertanian. Mengingat hampir 95 % masyarakat kita adalah petani dan tinggal di desa. Demikian juga halnya di bidang kelauatan dan perikanan. ,
5. Pemerintah juga perlu mengantisipasi kelangkaan pupuk bagi para petani untuk persiapan musim tanam padi di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026. Pemerintah diminta untuk menyiapkan pupuk subsidi secara pasti agar memudahkan petani untuk mendapatkannya secara mudah dan murah, sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk. Karena hal ini merupakan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati.
6. Dalam kegiatan Budaya Ngada yang telah mendapat perhatian serius dari Pemerintahan Kabupaten Ngada yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ngada periode 2024-2029. Fraksi menilai kegiatan budaya tersebut sebagai hal positif yang dapat memberikan daya ungkit terhadap meningkatnya wisatawan local dan manca Negara yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dari sector wisata budaya. Yang menjadi pertanyaan bagi fraksi PKB adalah apakah semua kegiatan budaya telah diakomodir melalui peta dan kalender kegiatan budaya Ngada yang dapat dipromosikan kepada para wisatawan baik local maupun manca negara, sehingga kehadiran wisatawan tidak terkesan kebetulan saja mengunjungi kegiatan budaya Ngada.
7. Berkaitan dengan keberadaan gedung ART Centre yang telah dibangun dengan biaya yang besar. Fraksi mengharapkan agar kebermafaatan dari ART Centre dapat meningkatkan pendapatan daerah dan manfat bagi masyarakat. Untuk itu, Fraksi perlu mendapatkan gambaran dan penjelasan Pemerintah terhadap rencana kegiatan tahunan yang dilaksanakan dinas terkait (Dinas Pariwisata) mengenai fungsi dari gedung ART Centre.
8. Fraksi meminta agar Pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk mengerjakan atau memperbaiki infrastruktur jalan di kabupaten Ngada yang saat ini belum dibangun atau yang mengalami kerusakan parah, termasuk di dalamnya : (1) memperbaiki ruas jalan Mataloko – Were di Kecamatan Golewa yang saat ini mengalami rusak parah. (2) peningkatan jalan keluar masuk Puskesmas Koeloda yang dimulai dari depan pintu Gebang Citra Bakti sampai kampung Boa Weo Malanuza yang saat ini dalam keadaan rusak parah. (3) penigkatan jalan dari Kantor Camat Golewa menuju Kampung Dolu Pore. (4) Peningkatan Jalan menuju Puskesmas Boba Kecacamaan Golewa Selatan. (5) Pembangunan jalan Liba - Mala, Dadawea – Mala, Doka – Wajamala, ruas jalan Wede –Karo Desa Were 4. (6) pengerjaan jalan Rakalaba – Zeu Golewa Barat. (7) perluasan jalan dari Bajawa menuju kampong Beiposo
9. Fraksi meminta Pemerintahuntuk mengenmbalikan program pembangunan jembatan timbang di Naru yang sebelumnya telah dialokasikan melalui Pokir Pimpinan DPRD Kabupataen Ngada.
10. Fraksi juga meminta Pemerintah untuk memperhatikan lampu-lamuu jalan baik yang berada di Kota Bajawa maupun yang berad di wilayah Kecamatan-kecamatan.

**PENUTUP**

Demikianlah beberapa catatan kritis yang dapat kami sampaikan sebagai Pemandangan Umum Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam menanggapi Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi PKB menyatakan MENERIMA Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada masa sidang ini sambil memperhatikan beberapa pokok pikiran dan catata kritis yang disampaikan. Sekian dan Terima Kasih. Semoga Tuhan Memberkati.

*Billahitaufiq Wal Hidayah, Wassalamulaikum Warahmatulahi Wabarakatu***.**

**Bajawa, 27 Agustus 2025**

**FRAKSI PKB**

**DPRD KABUPATEN NGADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| 1 | FROMENSIUS LOKO KISA, A.Md | KETUA |  |
| 2 | RICHARDUS BHARA, SH | SEKRETARIS |  |
| 3 | YOSEF FILIUS DAVID JAWA | ANGGOTA |  |